



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2888-2903

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Integratif untuk Menurunkan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia: Pendekatan Berbasis Data Spasial dan Reformasi Kebijakan Pangan

Lia Agustina Setyowati

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: [lia.asetyowati@gmail.com](mailto:lia.asetyowati@gmail.com)

### Abstrak

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran ketahanan pangan nasional. Meskipun angka PoU Indonesia menunjukkan penurunan dari 10,21% pada 2022 menjadi 8,53% pada 2023, disparitas regional yang tajam, khususnya di kawasan timur Indonesia, masih menunjukkan ketimpangan yang memerlukan intervensi kebijakan struktural. Kajian ini menganalisis akar masalah PoU melalui pendekatan 5 Why's dan data spasial, serta mengkaji efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan PoU tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh daya beli, distribusi logistik, kebijakan yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi gizi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disusun enam rekomendasi kebijakan strategis yang mencakup reformasi bantuan sosial pangan berbasis gizi, kebijakan distribusi berbasis data spasial, subsidi pertanian terarah, penguatan sistem informasi ketahanan pangan, serta integrasi edukasi gizi dalam sistem pendidikan dan kesehatan nasional. Seluruh rekomendasi diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan secara geografis maupun sosial.

Kata Kunci: *Strategi Integratif, Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia, Data Spasial, Reformasi Kebijakan Pangan*

## Abstract

The Prevalence of Undernourishment (PoU) is one of the main indicators used to measure national food security. Although Indonesia's PoU rate has decreased from 10.21% in 2022 to 8.53% in 2023, significant regional disparities—particularly in eastern Indonesia—still reflect inequalities that require structural policy intervention. This study analyzes the root causes of PoU using the 5 Why's approach and spatial data, while also evaluating the effectiveness of existing policies. The analysis reveals that PoU is not solely influenced by food availability, but also by purchasing power, logistical distribution, unintegrated policies, and low public nutrition literacy. Based on these findings, six strategic policy recommendations are proposed, including: nutrition-based food assistance reform, spatial data-driven distribution policies, targeted agricultural subsidies, strengthening of the food security information system, and the integration of nutrition education into the national education and health systems. All recommendations aim to build a resilient, adaptive, and geographically and socially equitable food security system.

*Keywords: Integrative Strategy, Food Insufficiency in Indonesia, Spatial Data, Food Policy Reform*

## PENDAHULUAN

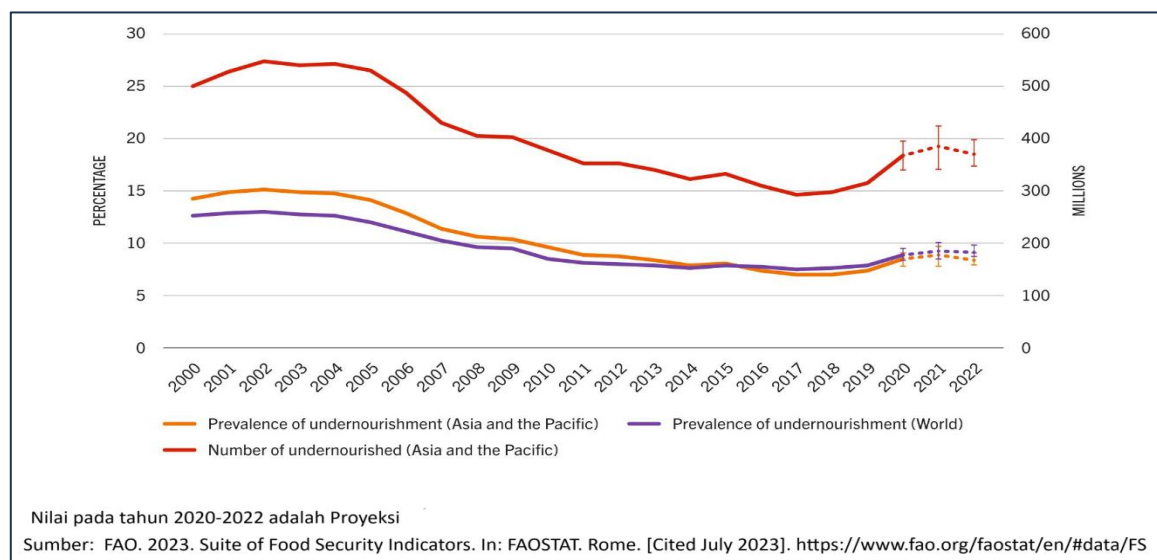
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia: Urgensi Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. PoU, atau definisi populasi terkena kekurangan, adalah salah satu ukuran penting untuk mencapai pembangunan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)* menawarkan data terbaru dalam Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan fluktuasi PoU di Indonesia: meskipun BPS menunjukkan penurunan dari 10,21% pada 2022 menjadi 8,53% pada 2023, PoU masih berjumlah lebih dari 22 juta jiwa populasi yang mengalami kekurangan energi kronis.

Sejalan dengan potensi SDM nasional, PoU seharusnya diperhitungkan sebagai salah satu faktor kunci yang dapat menghambat pencapaian potensi tersebut regioanl. Fluktuasi PoU terkait dengan ketidakstabilan: Krisis COVID-19, yang mempengaruhi rantai pasok dan penghasilan pembandara, adalah salah satu faktor peningkatan pertama PoU. Perubahan iklim juga menstimulasi frekuensi bencana alam, yang membatasi akses-pangan di wilayah terpencil dan beberapa rentan. Fluktuasi ditambah dengan simultaneous triple burden malnutrition, dengan stunting, wasting, and obesity sebagai tantangan perut di kawasan. Permasalahan utama yang hendak disoroti dalam tulisan ini adalah masih tingginya PoU, yang berpangkal pada kebijakan ketahanan pangan yang belum terintegrasi secara spasial,

serta belum menysasar akar masalah struktural dalam sistem distribusi dan produksi pangan nasional.

BPS menunjukkan analisis PoU yang tidak seimbang di kawasan, dengan beberapa provinsi di Timur Indonesia, seperti Papua atau Maluku, memiliki lebih dari rata-rata nasional: dua kali lipat yang dimiliki Jawa. Gambar 1 melibatkan PoU seluruh kawasan Asia Pasifik msua dibandingkan dengan kawasan lainnya secara global. Translatio: Sumber: Data dari FAO 2023.



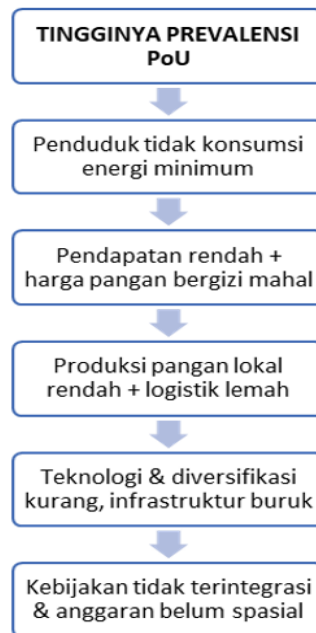
Gambar 1. Perbandingan Antara PoU di Asia Pacific Dengan Global (sumber FAO, 2023)

## Permasalahan

Indonesia menghadapi tantangan ganda dalam sektor pangan: meningkatnya PoU dan triple burden malnutrisi (stunting, wasting, dan obesitas). UNICEF (2023) mencatat lebih dari 4,5 juta anak mengalami stunting dan sekitar 2 juta mengalami wasting. Sementara itu, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli dan kualitas konsumsi masyarakat, khususnya pada kelompok 40% terbawah. Selain itu, perubahan iklim turut memperburuk ketahanan pangan dengan meningkatkan frekuensi bencana yang mengganggu distribusi dan produksi pangan (*World Food Programme, 2023*).

## Akar Permasalahan

Untuk mengidentifikasi akar struktural dan sistemik dari permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan, penulis menggunakan metode 5 Why's. Metode ini mengarahkan kebijakan ke perbaikan sistem produksi, distribusi, dan tata kelola kebijakan. Dengan cara ini, solusi yang diambil bisa lebih berkelanjutan, berbasis data spasial, dan menysasar pembangunan kapasitas wilayah yang paling terdampak.



Gambar 2. Diagram Akar Permasalahan Tingginya Prevalensi PoU.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya prevalensi PoU berakar pada serangkaian masalah yang saling terkait, yaitu:

- a. Why 1: *Tingginya prevalensi PoU* disebabkan oleh *penduduk tidak mengonsumsi energi minimum*.
- b. Why 2: *Penduduk tidak mengonsumsi energi minimum* disebabkan oleh *pendapatan rendah + harga pangan bergizi mahal*.
- c. Why 3: *Pendapatan rendah + harga pangan bergizi mahal* disebabkan oleh *produksi pangan lokal rendah + logistik lemah*.
- d. Why 4: *Produksi pangan lokal rendah + logistik lemah* disebabkan oleh *teknologi & diversifikasi kurang, infrastruktur buruk*.
- e. Why 5: *Teknologi & diversifikasi kurang, infrastruktur buruk* disebabkan oleh *kebijakan tidak terintegrasi & anggaran belum spasial*.

Analisis ini menunjukkan bahwa mengatasi PoU memerlukan intervensi yang komprehensif dan terintegrasi, yang menyorot akar masalah struktural dalam sistem produksi, distribusi, dan tata kelola pangan. Solusi yang berkelanjutan perlu berbasis data spasial dan menyorot pembangunan kapasitas wilayah yang paling terdampak.

## METODE PENELITIAN

### Tujuan Kebijakan

Mengukuhkan fondasi ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, dalam rangka mengakselerasi terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing di kancah global.

### Sasaran Kebijakan

- a. Reduksi PoU yang Terukur: Meminimalisasi tingkat PoU secara progresif, hingga mencapai ambang batas optimal yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) edisi terkini.
- b. Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Sistematis: Melakukan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat melalui implementasi program edukasi dan promosi pangan lokal yang kaya nutrisi dan memiliki harga yang kompetitif, yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara signifikan.
- c. Ekspansi Aksesibilitas Pangan Bergizi yang Egaliter: Memastikan aksesibilitas pangan bergizi bagi seluruh komponen masyarakat, dengan prioritas pada kelompok rentan dan wilayah geografis yang terisolasi, yang dicerminkan oleh penurunan disparitas harga komoditas pangan esensial antarwilayah secara substansial.
- d. Intensifikasi Produksi Pangan Berkelanjutan dan Resilien: Mengintensifkan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan inovasi teknologi terkini, praktik agrikultur yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta optimalisasi sumber daya lokal secara bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan peningkatan volume produksi pangan domestik.
- e. Konsolidasi Sistem Ketahanan Pangan yang Adaptif: Mengonsolidasikan sistem ketahanan pangan nasional yang adaptif terhadap volatilitas iklim dan turbulensi pasar pangan global, yang diukur dengan penurunan tingkat kerentanan terhadap guncangan eksternal secara signifikan.
- f. Modernisasi Tata Kelola Pangan yang Terintegrasi: Memodernisasi tata kelola pangan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta memanfaatkan platform data dan informasi yang akurat, *real-time*, dan menyeluruh, yang diindikasikan dengan peningkatan skor tata kelola pangan yang signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia membutuhkan pendekatan berbasis data yang komprehensif, baik secara kuantitatif maupun spasial. PoU menjadi indikator utama yang digunakan dalam mengukur tingkat ketahanan pangan suatu populasi, dan secara langsung merefleksikan kondisi konsumsi energi minimum masyarakat.

### Tren Nasional PoU (2019–2023)

PoU merupakan indikator utama yang mencerminkan proporsi penduduk yang tidak memperoleh asupan energi minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan aktif dan sehat. Dalam konteks Indonesia, tren PoU selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan sosial-ekonomi dan ketahanan sistem pangan nasional.

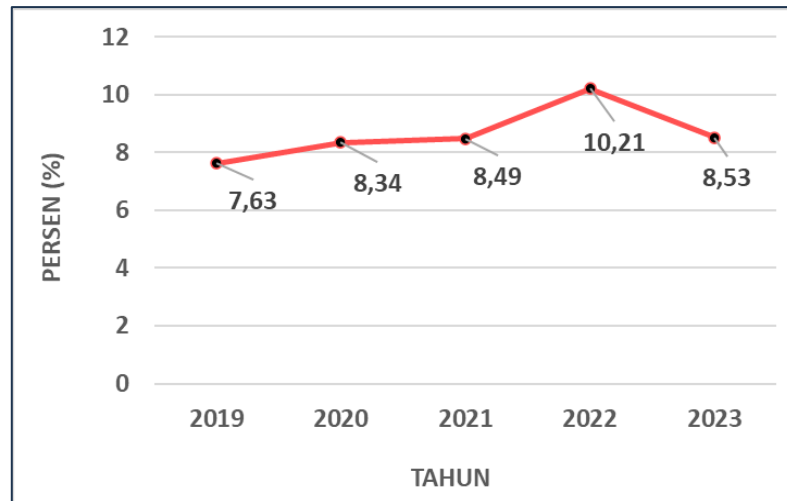
Berdasarkan data BPS (Gambar 3), nilai PoU Indonesia sempat mengalami penurunan bertahap pada awal periode, namun meningkat tajam pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun berikutnya. Berikut rincian fluktuasi tersebut:

- a. 2019–2021: Periode ini menunjukkan tingkat PoU yang relatif stabil, mencerminkan ketahanan pangan yang cukup terjaga sebelum dampak penuh pandemi COVID-19 dirasakan. Dukungan program bantuan sosial dan stabilitas produksi pangan turut menjadi faktor penopang.
- b. 2022: Terjadi lonjakan signifikan dalam angka PoU, mencapai 10,21%. Lonjakan ini secara langsung berkorelasi dengan dampak lanjutan pandemi COVID-19, yang mengganggu rantai pasok pangan, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar ketimpangan akses terhadap pangan bergizi di kelompok rentan. Ketergantungan pada sistem distribusi yang tersentralisasi dan belum adaptif terhadap krisis memperparah situasi.
- c. 2023: Penurunan PoU menjadi 8,53% mencerminkan pemulihan bertahap yang mulai terjadi dalam sistem ekonomi dan pangan nasional. Beberapa intervensi kebijakan mulai menunjukkan hasil, termasuk pemulihan ekonomi makro, penguatan bantuan sosial, serta inisiatif diversifikasi pangan berbasis komunitas.

Penurunan PoU pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan parsial dari kebijakan lintas sektor yang lebih terintegrasi. Namun demikian, angka ini masih jauh dari ambang aman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Terlebih lagi, angka nasional tersebut menyembunyikan ketimpangan spasial

yang ekstrem antarprovinsi, khususnya di wilayah timur Indonesia, yang justru menunjukkan nilai PoU di atas 30% pada tahun yang sama.

Dengan demikian, meskipun tren penurunan nasional patut diapresiasi, pemaknaannya harus tetap dikaitkan dengan konteks disparitas wilayah dan ketahanan sistem pangan lokal yang belum merata. Ke depan, strategi yang bersifat *place-based* dan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam menurunkan PoU secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 3. Nilai PoU di Indonesia (sumber BPS, 2023)

### Ketimpangan Spasial

Analisis spasial menunjukkan adanya disparitas yang tajam antarwilayah. Provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan Utara yang memiliki angka PoU yang jauh di atas rata-rata nasional, bahkan mencapai lebih dari 30% di beberapa daerah. Sementara wilayah barat, seperti Jawa dan Bali, cenderung memiliki angka PoU yang lebih rendah dan stabil.

Tabel 1. Nilai PoU Provinsi di Indonesia

PROVINSI	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	9,41	8,58	6,9	10,98	9,44
SUMATERA UTARA	4,84	6,73	6,33	8,7	8,6
SUMATERA BARAT	4,9	5,86	6,02	7,31	7,63
RIAU	8,32	9,16	10,61	15,12	12,33
JAMBI	8,95	9,12	9,25	12,14	12,83
SUMATERA SELATAN	9,04	9,77	6,82	7,37	6,53
BENGKULU	7,66	7,72	8,64	11,66	9,25
LAMPUNG	10,51	12,19	10,25	14,63	8,81
KEP. BANGKA BELITUNG	7,85	9,35	11,05	15,19	13,35
KEP. RIAU	4,08	6,07	7,71	11,3	9,83
DKI JAKARTA	1,43	1,94	2,2	3,42	2,57
JAWA BARAT	3,7	3,9	4,44	6,75	5,5
JAWA TENGAH	11,61	11,8	12,34	12,34	10,44
DI YOGYAKARTA	7,35	9,9	10,18	13,48	10,08
JAWA TIMUR	7,47	8,58	9,14	10,27	8,09
BANTEN	2,13	2,11	2,8	2,46	2,87
BALI	2,91	4,01	7,43	7,72	3,77
NUSA TENGGARA BARAT	2,77	2,97	1,78	2,24	2,17
NUSA TENGGARA TIMUR	14,11	13,12	11,84	13,74	14,98
KALIMANTAN BARAT	19,11	19,92	19,6	19,22	15,03
KALIMANTAN TENGAH	9,38	10,1	8,88	12,83	9,37
KALIMANTAN SELATAN	2,51	2,72	2,78	4,47	4,48
KALIMANTAN TIMUR	6,97	8,24	12,56	16,19	9,2
KALIMANTAN UTARA	10,12	12,11	12,75	23,01	15,92
SULAWESI UTARA	3,96	4,49	6,91	6,22	6,26
SULAWESI TENGAH	8,44	8,85	10,63	11,92	10,09
SULAWESI SELATAN	7,65	10,14	7,93	10,79	7,84
SULAWESI TENGGARA	8,79	10,06	11,17	17,14	10,49
GORONTALO	7,78	10,33	14,84	18,63	15,1
SULAWESI BARAT	6,79	9,16	10,81	9,82	8,29
MALUKU	34,12	35,55	29,62	31,68	30,27
MALUKU UTARA	35,81	35,48	28,86	30,71	29,56
PAPUA BARAT	19,22	23,09	24,59	29,38	24
PAPUA	38,21	31,49	37,37	36,18	35,63
PAPUA BARAT DAYA					
PAPUA SELATAN	-				
PAPUA TENGAH	-				
PAPUA PEGUNUNGAN					
<b>INDONESIA</b>	<b>7,63</b>	<b>8,34</b>	<b>8,49</b>	<b>10,21</b>	<b>8,53</b>

(sumber BPS, 2023 diolah)

Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pangan bergizi, distribusi logistik, infrastruktur pendukung, serta kapasitas produksi lokal yang masih terbatas di wilayah tertinggal. Kondisi geografis dan frekuensi bencana alam juga menjadi faktor pembatas tambahan di wilayah timur.

## Determinan PoU: Analisis Faktor-faktor Kunci

Studi oleh Solana (2022) dan analisis data BPS menunjukkan bahwa PoU dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu:

- a. Pengeluaran per kapita: Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh pangan bergizi.
- b. Inflasi harga pangan: Kenaikan harga bahan pokok mengurangi aksesibilitas pangan, terutama bagi kelompok miskin.
- c. Produksi pangan domestik: Fluktuasi produksi mempengaruhi pasokan dan kestabilan harga.
- d. Efektivitas bantuan sosial: Bantuan yang tidak tepat sasaran atau tidak mempertimbangkan kandungan gizi gagal menurunkan PoU secara signifikan.

## Implikasi Kebijakan

Data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa penurunan PoU memerlukan strategi yang ditargetkan, berbasis wilayah, dan multidimensional. Ketimpangan regional membutuhkan pendekatan desentralisasi dalam perencanaan intervensi. Sementara itu, penguatan data spasial dan real-time menjadi kunci dalam mendesain program yang responsif terhadap kondisi lokal.

## Kebijakan yang Telah dan Sedang Dijalankan

Penurunan PoU telah menjadi agenda strategis nasional sebagaimana tercantum dalam RAN-PG 2021–2024. Pemerintah menargetkan penurunan PoU hingga mencapai 5,7% pada tahun 2024. Untuk itu, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan secara terintegrasi, baik melalui pendekatan sektoral maupun lintas sektoral.

- a. Penguatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal  
Upaya peningkatan produksi pangan nasional dilakukan melalui berbagai program seperti intensifikasi pertanian, pengembangan lahan suboptimal, dan pemanfaatan teknologi pertanian adaptif. Diversifikasi pangan juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pokok tertentu. Hal ini diwujudkan melalui promosi konsumsi pangan lokal yang bergizi, serta penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.
- b. Optimalisasi PPH dan Prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)  
Pemerintah mempromosikan konsumsi pangan yang B2SA melalui edukasi dan penyuluhan gizi. Skor PPH digunakan sebagai indikator keberhasilan program ini,

dengan tren peningkatan menunjukkan adanya perbaikan dalam pola konsumsi masyarakat.

c. Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Penyelesaian masalah gizi dan ketahanan pangan dilakukan secara kolaboratif oleh Kemenkes, Kementan, Kemensos, Bappenas, BRIN, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memastikan sinergi program dan efisiensi alokasi sumber daya, terutama dalam menjangkau kelompok rentan di wilayah dengan PoU tinggi.

d. Inisiatif Inovatif: Program Makan Bergizi Gratis (2025)

Sebagai bagian dari strategi intervensi gizi, pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis pada tahun 2025 yang menargetkan 82,9 juta anak dan ibu hamil. Program ini bertujuan mengurangi angka stunting dan wasting, serta mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya konsumsi pangan berkualitas sejak usia dini.

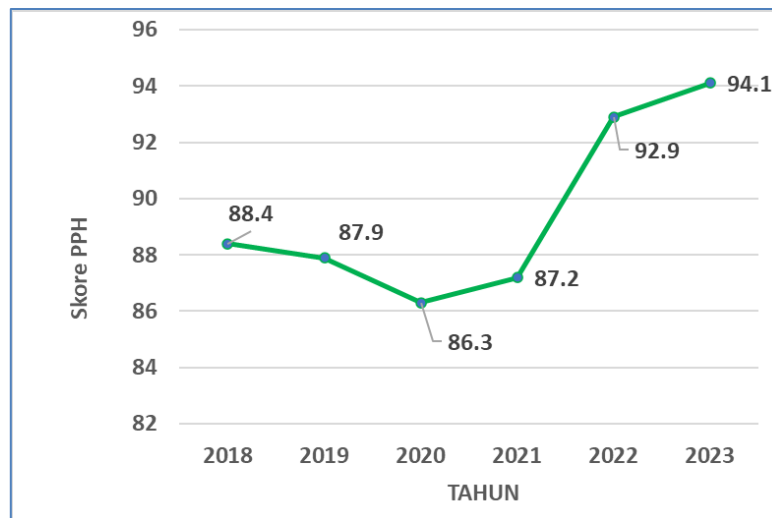
e. Penguatan Jaminan Sosial dan Intervensi Berbasis Data Spasial

Bantuan sosial yang disalurkan tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi diarahkan untuk mendukung konsumsi pangan bergizi melalui pendekatan berbasis wilayah dan data spasial PoU. Dengan digitalisasi dan pemanfaatan data real-time, efektivitas penyaluran bantuan meningkat, serta risiko kesalahan sasaran dapat diminimalisasi.

Tabel 2. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40,0 – 60,0	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	0,0 – 8,0	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	5,0 – 20,0	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0 – 15,0	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,0 – 3,0	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	2,0 – 10,0	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	2,0 – 15,0	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	3,0 – 8,0	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan bahan minuman	0,0 – 5,0	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah				2100	100,0	-	100,0

Sumber: \*) Harmonisasi PPH. Badan Ketahanan Pangan (2019)



Gambar 4. Skor Pola Pangan Harapan Nasional (sumber BPS, diolah 2024)

#### Kerangka Evaluasi Alternatif Kebijakan

Dalam menilai kelayakan dan efektivitas alternatif kebijakan yang diajukan, digunakan kerangka analisis berbasis enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (1999), yaitu:

- Efektivitas – sejauh mana kebijakan mencapai tujuan penurunan PoU;
- Efisiensi – perbandingan antara biaya dan manfaat kebijakan;
- Kecukupan – kemampuan solusi dalam mengurangi masalah secara signifikan;
- Kesetaraan (*equity*) – distribusi manfaat kebijakan secara adil di seluruh wilayah;
- Responsivitas – sensitivitas kebijakan terhadap kebutuhan kelompok rentan; dan
- Kelayakan administratif dan politik – kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut.

#### Alternatif Kebijakan untuk Menurunkan Konsumsi Pangan di Indonesia

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Indonesia yang bersifat multidimensi dan lintas sektor, diperlukan serangkaian alternatif kebijakan yang bersifat komprehensif, kontekstual, dan berbasis bukti. Alternatif yang disajikan di bawah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis akar masalah, dinamika spasial PoU antarwilayah, serta mengacu pada praktik-praktik baik yang relevan. Setiap alternatif juga dievaluasi menggunakan kerangka analisis yang mencakup enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan implementasi. Harapannya, alternatif ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

a. Reformasi Bantuan Sosial Berbasis Pangan Bergizi

Pergeseran paradigma dalam penyaluran bantuan sosial menjadi esensial untuk merespons tantangan ketidakcukupan konsumsi pangan. Alih-alih sekadar mendistribusikan komoditas karbohidrat pokok, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, yakni menyediakan paket bantuan yang kaya akan elemen gizi esensial. Paket ini seyogianya mencakup protein hewani sebagai sumber asam amino vital, sayuran lokal yang kaya vitamin dan mineral, serta sumber nutrisi mikro lainnya. Distribusi bantuan diprioritaskan pada rumah tangga di wilayah dengan tingkat PoU tertinggi, dengan memanfaatkan data spasial yang akurat dan sistem digitalisasi untuk memastikan ketepatan sasaran. Kendati demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen anggaran yang substansial, koordinasi lintas sektor yang intensif, serta antisipasi terhadap tantangan logistik di wilayah terpencil.

b. Subsidi Input Pertanian Spesifik Wilayah Rawan PoU

Strategi intervensi yang menjanjikan adalah pemberian subsidi input pertanian yang disesuaikan dengan kondisi spesifik petani di wilayah rawan pangan. Subsidi dapat berupa benih unggul yang adaptif terhadap iklim lokal, pupuk organik yang mendukung keberlanjutan lingkungan, serta peralatan pertanian modern yang meningkatkan efisiensi produksi. Prioritas pendistribusian subsidi diberikan kepada wilayah dengan tingkat PoU tertinggi, dengan tujuan mendongkrak produksi pangan lokal. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan, serta kondisi agroklimat dan infrastruktur irigasi yang memadai.

c. Diversifikasi Pangan Lokal melalui Inovasi Komersial

Untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk pangan lokal bernilai gizi tinggi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif yang dapat diberikan mencakup pelatihan keterampilan, akses pembiayaan yang terjangkau, serta fasilitasi adopsi teknologi produksi dan pengolahan pangan modern. Dukungan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan utama terletak pada perlunya dukungan pemasaran dan promosi yang efektif, serta akses permodalan yang mudah bagi UMKM.

- d. Integrasi Program Edukasi Gizi dalam Kurikulum dan Layanan Kesehatan Primer  
Penguatan literasi gizi masyarakat merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk membentuk perilaku konsumsi pangan yang sehat. Strategi yang efektif adalah mengintegrasikan materi edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat usia dini hingga menengah, serta menyisipkan pesan-pesan gizi dalam layanan kesehatan primer yang menasar ibu hamil dan menyusui. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen untuk merevisi kurikulum secara berkala, melatih tenaga pendidik dan kesehatan dengan kompetensi yang relevan, serta menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung praktik gizi yang baik.
- e. Penguatan Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Spasial  
Respons yang cepat dan tepat terhadap krisis pangan memerlukan informasi yang akurat dan *real-time* tentang indikator-indikator ketahanan pangan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan *dashboard* nasional yang mampu memantau harga pangan, produksi lokal, tingkat PoU, dan indikator relevan lainnya secara spasial. Sistem peringatan dini ini akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada koordinasi yang solid antarlembaga pemerintah, investasi dalam teknologi dan infrastruktur data yang handal, serta jaminan kualitas data yang dikumpulkan.

#### Rekomendasi Kebijakan

Untuk menurunkan PoU dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, pemerintah perlu menerapkan enam kebijakan strategis yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Setiap kebijakan ditujukan secara spesifik kepada aktor yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan strategis dan operasional.

- a. Penguatan Kebijakan Satu Data Pangan Nasional Berbasis Spasial  
Kementan bersama BRIN, Bapanas, dan BIG perlu menetapkan kebijakan pembangunan sistem satu data pangan nasional berbasis spasial. Sistem ini akan menjadi acuan dalam merancang intervensi ketahanan pangan lintas wilayah, termasuk distribusi bantuan pangan dan pemantauan harga. Platform data ini juga harus mampu mengidentifikasi wilayah prioritas PoU secara *real-time*, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

- b. Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  
Badan Pangan Nasional bersama BGN dan Kemenkes perlu merumuskan kebijakan penguatan tata kelola Program MBG, yang mencakup standarisasi menu bergizi, mekanisme pengawasan distribusi, serta pelibatan pemerintah daerah. Reformasi kelembagaan ini juga harus mengatur integrasi data penerima manfaat dengan sistem satu data nasional, guna meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan PoU dan prevalensi stunting di wilayah-wilayah prioritas.
- c. Restrukturisasi Skema Subsidi Input Pertanian Spesifik Wilayah  
Kementerian Pertanian bersama dinas pertanian provinsi dan kabupaten perlu menyusun kebijakan restrukturisasi skema subsidi input pertanian yang diarahkan secara spesifik ke wilayah dengan prevalensi PoU tinggi. Kebijakan ini mencakup penyesuaian subsidi benih, pupuk, dan alat pertanian berdasarkan agroekologi lokal dan kemampuan produksi wilayah. Dengan pendekatan spasial, efektivitas subsidi dapat ditingkatkan, serta produksi pangan lokal dapat diperkuat untuk memenuhi kebutuhan energi minimum masyarakat setempat.
- d. Insentif Pendanaan dan Skema Kemitraan untuk Penguatan Pangan Lokal  
Kementerian Pertanian, lembaga perbankan nasional, dan pelaku usaha swasta perlu menetapkan kebijakan insentif pembiayaan inklusif bagi petani dan UMKM pangan lokal melalui mekanisme KUR khusus pangan dan kemitraan berbasis tanggung jawab sosial Perusahaan. Dukungan ini perlu diperkuat dengan regulasi insentif fiskal dan jaminan pasar oleh BUMN pangan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.
- e. Integrasi Literasi Gizi dalam Sistem Pendidikan dan Layanan Kesehatan Primer  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Kesehatan perlu menetapkan kebijakan wajib integrasi literasi gizi dalam kurikulum formal dan layanan kesehatan primer. Materi gizi disesuaikan dengan konteks lokal dan disampaikan melalui pendekatan berbasis siklus hidup, dimulai dari usia dini hingga remaja, serta diperkuat dalam program posyandu dan Puskesmas. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk perilaku konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan di tingkat rumah tangga.
- f. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Nasional (*Food Security Early Warning System/FSEWS*)  
Kementan, Bapanas, BGN, dan BRIN perlu mengembangkan kebijakan penguatan sistem peringatan dini ketahanan pangan nasional. Sistem ini dirancang sebagai

instrumen prediktif dan responsif terhadap dinamika produksi, harga, dan konsumsi pangan yang berbasis wilayah. FSEWS akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis pemerintah dalam merespons potensi krisis pangan dan mengalokasikan sumber daya secara adaptif.

## SIMPULAN

Tingginya prevalensi tingkat kekurangan Potongan Ukuran (PoU), terutama di Indonesia Timur, menunjukkan bahwa ketahanan pangan bangsa kita masih menghadapi tantangan struktural dan spasial yang mendasar. Meskipun indikator PoU nasional meningkat pada tahun 2023, ketimpangan antar wilayah tetap ada, dan isu-isu mendasar seputar produksi, distribusi, dan konsumsi makanan bergizi belum ditangani dengan baik.

Analisis khusus isu yang terkandung dalam makalah ini berpendapat bahwa kebijakan sektoral dan generik telah kekurangan relevansi berdampak yang diperlukan untuk merespons tantangan PoU dengan tepat. Masalah ini berasal, sebagian, dari kurangnya ketersediaan pangan tetapi juga dari daya beli yang terbatas, distribusi yang tidak efisien, pendidikan gizi yang lemah, dan kurangnya data spasial yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan berbasis bukti.

Sebagai respons, rekomendasi kebijakan strategis yang diarahkan secara eksplisit telah diajukan kepada kementerian dan lembaga lainnya, yang jumlahnya mencapai enam. Kementan, BRIN, dan Bapanas diharapkan untuk menciptakan sistem data pangan satu-spasial nasional. Bapanas dan BGN perlu mereformasi kerangka kelembagaan dan tata kelola dalam program makanan bergizi gratis. Kementan dan dinas pertanian daerah disarankan untuk menyusun kembali skema subsidi input. Pembiayaan inklusif dan skema CSR kemudian diarahkan kepada Kementan, industri perbankan, dan sektor swasta. Literasi gizi yang diperkuat kemudian disajikan sebagai domain Kemendikbudristek dan Kemenkes. Akhirnya, inisiatif kolaboratif dipimpin oleh Kementan, Bapanas, BGN, dan BRIN untuk mengembangkan sistem peringatan dini ketahanan pangan nasional (FSEWS).

Kebijakan dirumuskan bukan sebagai rekomendasi teknis, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang mampu merencanakan dan mengatur lintas sektor. Dengan data yang akurat, lembaga yang diperkuat, dan sinergi antar aktor, intervensi yang bertujuan pada ketepatan dan dampak berkelanjutan terhadap PoU dapat dicapai.

Namun, beberapa keterbatasan disebutkan. Makalah ini tidak mencakup kuantifikasi proyeksi dampak kebijakan jangka menengah hingga panjang. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang menggabungkan pemodelan spasial, ekonomi pangan, dan simulasi

kebijakan sangat penting untuk memperkuat kerangka pengambilan keputusan di masa depan. Dengan pendekatan berbasis bukti dan korektif struktural, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua warganya tanpa terkecuali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Associated Press. (2025). Indonesia launches free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition. <https://apnews.com/article/213a04587203434f3f85950725e84a8b>
- BAPPENAS. (2021). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024.
- Dunn, W. N. (1999). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Solana, A. (2022). Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics 2022.
- UNICEF Indonesia. (2023). Nutrition. <https://www.unicef.org/indonesia/nutrition>
- World Food Programme. (2023). Indonesia. <https://www.wfp.org/countries/indonesia>
- Yahya, M. G., Utami, I. P., & Ariansyah, S. (2023). Spatial Modelling of Prevalence of Undernourishment Using Food Security Approach in Indonesia in 2022. Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1), 73–82.